

PERANAN GROSSE AKTA PENGAKUAN HUTANG DALAM
EKSEKUSI JAMINAN KREDIT HARTA KEKAYAAN

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas
Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur



Oleh :

NIA MARDIANTO

NPM. 0771010004

YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA
TIMUR
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
SURABAYA
2012

PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI
PERANAN GROSSE AKTA PENGAKUAN HUTANG DALAM EKSEKUSI
JAMINAN KREDIT HARTA KEKAYAAN

Disusun oleh :

NIA MARDIANTO
NPM. 0771010004

Telah disetujui untuk mengikuti Ujian Skripsi

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Sutrisno S.H, M.Hum
NIP. 19601212 198803 1001

Mas Anienda TF.,SH.,MH
NPT. 3 7709 07 0223

Mengetahui,
DEKAN

Haryo Sulistiyantoro, SH, MM
NIP. 19620625 199103 1 001

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI
PERANAN GROSSE AKTA PENGAKUAN HUTANG DALAM EKSEKUSI
JAMINAN KREDIT HARTA KEKAYAAN

Oleh:

NIA MARDIANTO
NPM. 0771010004

Telah dipertahankan dihadapan dan diterima Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional “VETERAN” Jawa Timur
Pada Tanggal 5 Juni 2012

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Tim Penguji
1.

Sutrisno, SH.,M.Hum
NIP. 19601212 198803 1 001

Sutrisno, SH.,M.Hum
NIP. 19601212 198803 1 001
2.

Pembimbing Pendamping

Mas Anienda TF, SH., MH
NPT. 3 7709 07 0223

Hariyo Sulistiyantoro,SH.,MM
NIP. 19620625 199103 1 001
3.

Subani SH.,M.Si.
NIP. 19510504 198303 1 001

Mengetahui,
DEKAN

Haryo Sulistiyantoro, SH., MM
NIP. 19620625 199103 1 001

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN REVISI SKRIPSI

PERANAN GROSSE AKTA PENGAKUAN HUTANG DALAM EKSEKUSI JAMINAN KREDIT HARTA KEKAYAAN

Disusun Oleh :

NIA MARDIANTO
NPM. 0771010004

Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
Pada tanggal : 5 Juni 2012

Tim Penguji :

Tanda Tangan

1. Haryo Sulistiyantoro, SH., M.M. : (.....)
NIP. 19620625 199103 1 001
2. Subani, SH., M.Si. : (.....)
NIP. 19510504 198303 1 001
3. Sutrisno, SH., M.Hum : (.....)
NIP. 19601212 198803 1 001

Mengetahui,
DEKAN

Haryo Sulistiyantoro, SH., M.M.
NIP. 19620625 199103 1 001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NIA MARDIANTO
Tempat/Tgl Lahir : SURABAYA, 12 NOVEMBER 1987
NPM : 0771010004
Konsentrasi : PERDATA
Alamat : JL. CENDRAWASIH BUNDERAN NO. 117 REWWIN
SIDOARJO

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul : PERANAN GROSSE AKTA PENGAKUAN HUTANG DALAM EKSEKUSI JAMINAN KREDIT HARTA KEKAYAAN dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya ciptaan saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila di kemudian hari ternyata skripsi ini hasil jiplakan (plagiat) maka, saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Mengetahui
Pembimbing Uama

Surabaya, April 2012
Penulis

Sutrisno S.H., M.Hum
NIP. 19601212 198803 1001

Nia Mardianto
NPM. 0771010004

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan doa dan puji syukur ke hadirat Allah SWT yang atas kemurahan-Nya telah memberikan rahmat dan ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PERANAN GROSSE AKTA PENGAKUAN HUTANG DALAM EKSEKUSI JAMINAN KREDIT HARTA KEKAYAAN”. Penyusunan laporan ini adalah untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

Dalam penyusunan laporan ini, penulis memperoleh masukan, bimbingan, pengarahan, dan dorongan semangat dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, perkenankanlah penyusun menyampaikan terima kasih disertai penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Haryo Sulistyantoro, SH., M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jatim.
2. Bapak Sutrisno, SH., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jatim. Sekaligus sebagai dosen pembimbing pertama skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing penulis menyelesaikan laporan ini.
3. Bapak Drs. E.C. Gendut Sukarno, M.S., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jatim.
4. Bapak Subani, SH., M.Si., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jatim.

5. Ibu Mas Anienda T. F., SH., MH., selaku dosen pembimbing kedua skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Kepada Kepala Pengadilan Negeri Surabaya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan wawancara di Pengadilan Negeri Surabaya.
7. Kepada Notaris CHOIRIYAH, S.H. yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan wawancara di Kenotarisan.
8. Tim Penguji skripsi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
9. Bapak / Ibu Dosen Fakultas Hukum UPN “ Veteran” Jatim yang telah mendidik dan memberikan bekal ilmu.
10. Kepala Tata Usaha Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jatim beserta staf yang telah memberi pelayanan pengurusan administrasi.
11. Untuk Bapak yang selalu memberikan senyum dan semangat dalam setiap langkah penulis, Ibu yang senantiasa mendoakan.
12. Untuk Mas Deny Setiawan calon suami yang dengan setia memberikan dorongan semangat, motivasi di tengah kejenuhan penulis serta do’a yang tulus hingga terselesaikannya skripsi ini.
13. Sahabat-sahabat penulis Krisna, Kadek, Hanny, Putri, dan teman-teman angkatan 2007 yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan motivasi dalam penyusunan laporan magang ini.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, kritik dan saran yang bersifat membangun penulis harapkan karena kurangnya pengalaman dan keterbatasan pengetahuan yang penyusun miliki.

Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Surabaya, Mei 2012

Penulis

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”
JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM

Nama Mahasiswa : Nia Mardiaanto
NPM : 0771010004
Tempat dan Tanggal Lahir : Surabaya, 12 November 1987
Program Studi : Ilmu Hukum Strata 1 (S1)
Judul Skripsi :

PERANAN GROSSE AKTA PENGAKUAN HUTANG DALAM EKSEKUSI
JAMINAN KREDIT HARTA KEKAYAAN

ABSTRAKSI

Dalam praktek perbankan suatu realisasi kredit biasanya dilakukan dalam bentuk perjanjian pengakuan hutang oleh debitur kepada kreditur, dimana debitur mengakui berhutang kepada bank sejumlah atau senilai uang tertentu, dengan jangka waktu tertentu, biaya-biaya dan denda-denda sesuai dengan yang diperjanjikan para pihak. Dengan demikian jelaslah bahwa dalam setiap penerima kredit, debitur harus membuat perjanjian pengakuan hutang dengan bank dengan kewajiban untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen. Sumber data yang diperoleh dari literatur dan perundang-undangan yang berlaku. Analisa data menggunakan analisa kualitatif.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam menggunakan grosse akta pengakuan hutang mempunyai peranan grosse akta pengakuan hutang dalam penyelesaian eksekusi jaminan kredit. Di dalam keuntungan dalam menyelesaikan eksekusi jaminan kredit harta kekayaan yaitu menghemat waktu, menghemat biaya dan menimbulkan kepastian hukum. Disamping itu proses eksekusi haruslah memenuhi tata cara dan syarat-syarat serta tahapan-tahapan yaitu peringatan (aanmaning), penetapan dan berita acara eksekusi. Penyalahgunaan isi grosse akta antara lain disini adalah adanya pencampuran isi antara grosse akta hipotek dengan grosse akta pengakuan hutang, kekeliruan cara penerbitan dokumen akta kuasa memasang hipotek, dan kendala executorial verkoop atas grosse akta ialah mengenai soal perselisihan jumlah hutang yang harus dibayar debitur.

Kata Kunci : Grosse Akta, Pengakuan Hutang, Jaminan Kredit.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN REVISI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian	7
1.5. Kajian Pustaka	8
1.5.1. Tinjauan Umum tentang Grosse Akta	
1.5.1.1. Pengertian Grosse Akta	8
1.5.1.2. Bentuk Grosse Akta	10
1.5.1.3. Asas Grosse Akta	11
1.5.1.4. Kekuatan Pembuktian dari Grosse Akta	12
1.5.1.5. Macam-macam Grosse Akta	17
1.5.2. Tinjauan Umum tentang Grosse Akta Pengakuan Hutang	
1.5.2.1. Pengertian Grosse Akta Pengakuan Hutang	20
1.5.2.2. Syarat Grosse Akta Pengakuan Hutang	21

1.5.2.3. Eksekusi Grosse Akta Pengakuan Hutang	24
1.5.3. Pelaksanaan Eksekusi Grosse Akta Pengakuan Hutang	28
1.5.4. Kompetensi Pengadilan	33
1.6. METODE PENELITIAN	
1.6.1. Pendekatan Masalah	34
1.6.1.1. Jenis dan Tipe Penelitian	34
1.6.1.2. Sumber Data	34
1.6.2. Metode Pengumpulan dan Pengelolaan	36
1.6.3. Metode Analisis Data	37
1.6.4. Lokasi Penelitian	37
1.6.5. Waktu Penelitian	38
1.6.6. Sistematika Penulisan	38
BAB II PERANAN GROSSE AKTA PENGAKUAN HUTANG DALAM PENYELESAIAN EKSEKUSI JAMINAN KREDIT.	
2.1. Keuntungan Penyelesaian Eksekusi Jaminan Kredit Harta Kekayaan dengan Menggunakan Grosse Akta	73
2.2. Tata Cara Eksekusi Grosse Akta	80
BAB III HAMBATAN PELAKSANAAN EKSEKUSI GROSSE AKTA PENGAKUAN HUTANG	
3.1. Hambatan-hamabatan Dalam Eksekusi	85
3.2. Adanya Perbedaan Pendapat Antara Notaris dengan Hakim Dalam Menilai Akta Dalam Bentuk Grosse Yang Mempunyai Kekuatan Eksekutorial	89

3.3. Penyalahgunaan Isi Grosse Akta yang Terbentuk Pengakuan

Hutang	102
--------------	-----

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan	109
-----------------------	-----

4.2. Saran	110
------------------	-----

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia sekarang ini sedang mengalami berbagai permasalahan baik dalam bidang ekonomi, sosial, politik, pendidikan, budaya dan keamanan yang sangat kompleks sifatnya dan secepatnya harus diselesaikan khususnya di bidang ekonomi yang menyangkut seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan Nasional merupakan program Pemerintah yang dilaksanakan secara berkesimbangan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik materiil dan spirutual. Salah satu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah dengan mengembangkan perekonomian dan perdagangan yang memerlukan dana yang tidak sedikit. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi disini bukan hanya dimiliki oleh satu golongan atau sebagian masyarakat saja tetapi oleh seluruh masyarakat bangsa Indonesia dan harus banar-benar dapat dirasakan manfaatnya sebagai usaha untuk meningkatkan taraf hidup yang layak.

Hambatan dan kesulitan yang muncul justru berkenaan dengan pengadaan modal, dimana peranan lembaga keuangan khususnya bank sangat dibutuhkan karena fungsi bank adalah penghimpunan dan penyalur dana dari dan ke masyarakat yang memerlukan. Sejalan dengan pembangunan bidang ekonomi maka bidang perkreditan diarahkan kepada peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat, karena bidang perkreditan merupakan unsur yang sangat menunjang atau memiliki peranan yang cukup besar dalam rangka

mensukseskan pembangunan di bidang ekonomi khususnya penyediaan modal. Untuk mengetahui peranan bidang perkreditan di dalam rangka mensukseskan pembangunan bidang ekonomi di Indonesia tidak dapat lepas dari ketentuan Pemerintah sebagaimana yang terutang dalam Garis Besar Haluan Negara.

Dalam praktek perbankan suatu realisasi kredit biasanya dilakukan dalam bentuk perjanjian pengakuan hutang oleh debitur kepada kreditur, dimana debitur mengakui berhutang kepada bank sejumlah atau senilai uang tertentu, dengan jangka waktu tertentu, biaya-biaya dan denda-denda sesuai dengan yang diperjanjikan para pihak. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari debitur. Agunan merupakan salah satu unsur jaminan dari pemberi kredit, agunan dan unsur-unsur lain merupakan dasar penilaian untuk dapat memberikan keyakinan akan kemampuan debitur mengembalikan hutangnya, agunan harus berupa barang. Bank wajib meminta agunan berupa barang yang berkaitan langsung dengan obyek yang dibiayai, yang lazim dikenal dengan jaminan tambahan atau agunan tambahan. Agunan tambahan dapat berupa benda bergerak maupun tidak bergerak (benda tetap yaitu tanah, bangunan, gedung). Dengan demikian jelaslah bahwa dalam setiap penerima kredit, debitur harus membuat perjanjian pengakuan hutang dengan bank dengan kewajiban untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Apabila debitur melakukan cidera janji dalam hal

pengembalian kredit maka akan timbul berbagai kesulitan baik bagi bank maupun debitur karena akan timbul persengketaan yang penyelesaiannya membutuhkan berbagai lembaga lain seperti Pengadilan, KP2LN (Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara) dan juga waktu, tenaga dan biaya dalam hal yang dinamakan kredit macet. dalam penyelesaian sengketa menyangkut kredit macet, solusi yang hendak dicapai dan diinginkan oleh pihak bank adalah eksekusi terhadap jaminan debitur, landasan hukum yang selama ini digunakan adalah akta pengakuan hutang yang dibuat secara notariil. Akta pengakuan hutang merupakan perjanjian sepihak, didalamnya hanya dapat memuat suatu kewajiban untuk membayar hutang sejumlah uang tertentu atau pasti. Oleh karena itu dalam praktek sering diadakan grosse akta pengakuan hutang yang dibuat di depan dan oleh Notaris yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan dapat dipergunakan pihak kreditur untuk menagih piutangnya manakala pihak debitur lalai membayar hutangnya. Grosse akta tersebut tidak perlu dibuktikan, sehingga harus dianggap benar apa yang tercantum di dalamnya, kecuali jika ada bukti lawan. Hal tersebut dimungkinkan karena di dalam grosse akta pengakuan hutang itu oleh notaris dibuat dengan kepala “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.¹ Dengan adanya kata-kata tersebut, maka grosse akta mempunyai titel eksekutorial yang dipersamakan dengan keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Dasar hukum dari

¹Santia Dewi & R. M. Fauwas Diradja, Panduan Teori dan Praktek Notaris, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011, hlm. 55.

ketentuan tersebut diatas terdapat di dalam Pasal 224 HIR (Het Herziene Reglement) yang berbunyi :²

Suatu grosse dari pada akta hipotek dan surat hutang yang diperbuat dihadapan Notaris di Indonesia dan yang kepala memakai perkataan “Atas Nama Seri Baginda Raja” berkekuatan sama dengan putusan hakim. Jika surat yang demikian itu tidak ditepati dengan jalan damai, maka perihal menjalankannya dilakukan dengan perintah dan pimpinan Ketua Pengadilan Negeri yang dalam pegangannya orang yang berhutang itu diam atau tinggal atau memilih kedudukannya yaitu secara yang dinyatakan pada pasal-pasal di atas dalam bagian ini, akan tetapi dengan pengertian bahwa paksa badan itu hanya boleh dilakukan jika sudah diizinkan dengan putusan hakim. Jika hal melakukan putusan hakim itu harus dijalankan sama sekali atau sebagaiannya di luar daerah hukum Pengadilan Negeri, yang ketuanya menyuruh melakukan itu maka diturutilah peraturan pada Pasal 195 ayat kedua dan yang berikutnya.

Keistimewaan grosse akta tersebut adalah dalam proses penyelesaian suatu perjanjian hutang dimana tidak melalui proses yang lazim dan umum yang harus ditempuh perihal mengadili perkara perdata yang harus diperiksa oleh Pengadilan Negeri seperti yang tercantum dalam Pasal 118 HIR. Dalam grosse akta tersbut telah melekat kekuatan eksekutorial, yang selanjutnya apabila debitur lupa untuk memenuhi kewajibannya maka kreditur terbuka jalan untuk mengajukan permohonan eksekusi grosse akta kepada ketua Pengadilan Negeri dimana debitur diam atau tinggal atau tempat kedudukan yang telah dipilih dalam akta (Pasal 118 ayat 1 jo ayat 4 HIR). Dalam suasana perekonomian yang stabil dan menanjak, ikatan perkreditan yang dituangkan dalam grosse akta jarang sekali berakhir dengan tindakan eksekusi penjualan lelang. Hal ini dikarenakan pada suasana kehidupan perekonomian stabil dan meninjak para debitur mampu menunaikan penyelesaian pembayaran

²R. Soesilo, RIB/RBG Dengan Penjelasan, Politea, Bogor, 1985, hlm. 160.

kreditnya kepada pihak kreditur. Akan tetapi lain halnya dalam keadaan kelesuan dunia perekonomian seperti yang terjadi pada saat sekarang ini. Timbul gejala bahwa pihak debitur tidak sanggup membayar hutangnya yang dapat dibuktikan dengan fakta tentang banyaknya permintaan *executorial verkoop* dari pihak kreditur terutama di kota-kota besar yang tergolong pusat-pusat kegiatan bisnis dan industri.

Hampir setiap hari ada permintaan eksekusi berdasarkan Pasal 224 HIR. Gejala dan fakta derasnya arus permintaan eksekusi tersebut atas pengakhiran perjanjian kredit berdasar Pasal 224 HIR memberi bukti bahwa kelesuan perekonomian telah mengakibatkan kegagalan dan ketidakmampuan pihak debitur memenuhi kewajibannya melunasi pembayaran hutang. Akibat hukumnya para debitur yang demikian berada pada kategori wanprestasi yang memberi hak dan kewenangan bagi pihak kreditur untuk menyeret pihak debitur ke dalam ancaman eksekusi penjualan lelang atau *execution* berdasar Pasal 224 HIR, karena perjanjian kreditnya dituangkan dalam *grosse akta*. Terlepas dari pembicaraan tentang adanya kaitan pemanfaatan Pasal 224 HIR dengan laju pertumbuhan ekonomi pada satu pihak dan keleluasaan kehidupan perekonomian pada pihak lain, penerapan Pasal 224 HIR dalam prakteknya sering menimbulkan masalah atau hambatan. Hambatan *grosse akta* pengakuan hutang disebabkan beberapa faktor, antara lain faktor kelicikan mengulur waktu dari pihak debitur, ada pula faktor kecurangan yang dilakukan pihak kreditur seperti kecurangan tidak memasukan

pembayaran yang dilakukan debitur dalam rekening pembukuan.³ Namun faktor kendala yang paling banyak ditemukan adalah hal-hal yang berkenaan dengan pembuatan dokumen-dokumen grosse akta yang bersangkutan. Padahal bagi pengadilan dan secara yuridis syarat formal keabsahan setiap grosse akta merupakan peranan keabsahan grosse akta untuk dapat disamakan eksistensinya sebagai putusan yang mengandung nilai, mempunyai kekuatan eksekusi yang dapat dijalankan eksekusinya. Berdasarkan pengamatan kekeliruan pembuatan dokumen grosse akta kebanyakan disebabkan kurang persiapan memahami dan mendudukkan bentuk grosse akta yang ditentukan dalam Pasal 224.

Hal yang diuraikan diatas dialami oleh para kreditur (bank) yang mempunyai piutang terhadap debitur yang ketika akan dieksekusi grosse aktanya yang mengalami masalah yang cukup pelik, sehingga akhirnya terpaksa diselesaikan di Pengadilan Negeri. Pada dasarnya masalah yang dihadapi para kreditur dalam mengeksekusi grosse akta pengakuan hutangnya adalah pihak debitur merasa keberatan dengan adanya eksekusi grosse akta pengakuan hutang yang diajukan oleh kreditur kepada Pengadilan Negeri. Hal ini dikarenakan pada saat kreditur mengajukan permohonan eksekusi yang dikabulkan oleh Pengadilan Negeri tersebut, menurut pihak debitur bertentangan dengan hukum yang berlaku, karena permohonan eksekusi tersebut dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo pelunasan utang debitur. Berkaitan dengan uraian di atas, maka Penulis tertarik untuk meneliti masalah

³Victor. M. Situmorang & Cormentya Sitanggang, *Grosse Akta Dalam Pembuktian dan Eksekusi*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 148.

tersebut dan menuliskan hasilnya dalam skripsi berjudul : PERANAN GROSSE AKTA PENGAKUAN HUTANG DALAM EKSEKUSI JAMINAN KREDIT HARTA KEKAYAAN.

1.2. Rumusan Masalah

- a. Apakah peranan grosse akta pengakuan hutang dalam penyelesaian eksekusi jaminan kredit?
- b. Apakah hambatan pelaksanaan eksekusi Grosse Akta Pengakuan Hutang Di Pengadilan Negeri?

1.3. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui peranan grosse akta pengakuan hutang yang sebenarnya.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan eksekusi grosse akta pengakuan hutang di Pengadilan Negeri.

1.4. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Praktisi.
 1. Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi kalangan praktisi yakni Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah, dan kalangan perbankan mengenai sejauh mana peranan suatu grosse akta pengakuan hutang dalam pelaksanaan perjanjian kredit perbankan.
 2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu gambaran kepada kalangan praktisi tentang akibat hukum yang timbul dari grosse akta pengakuan hutang dalam perjanjian kredit perbankan.

b. Manfaat Teoritis.

Diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum perdata materiil yang bersangkutan dengan grosse akta pengakuan hutang.

1.5. Kajian Pustaka

1.5.1. Tinjauan Umum tentang Grosse Akta

1.5.1.1. Pengertian Grosse Akta

Di dalam kamus hukum yang disusun oleh Mr. Fockema Andrea disebutkan bahwa grosse akta adalah salinan pertama dari akta otentik, salinan yang pertama-tama dikeluarkan dari suatu tulisan otentik atau dari suatu putusan pengadilan yang diperuntukkan bagi yang berkepentingan sebagai kebalikan dari naskah asli (minut) yang tetap berada dalam simpanan pejabat yang bersangkutan. Mengenai definisi grosse akta, martias Gelar Radjo Mulano menyatakan bahwa : “Grosse adalah salinan suatu akta otentik yang diperbuat dalam bentuk yang dapat dilaksanakan, atau grosse dari suatu akta otentik yang memuat pada bagian kepalanya : Demi keadilan Berdasarkan Ke-Tuhan-an yang Maha Esa.⁴ Menurut Lumban Tobing, Grosse adalah salinan atau (secara pengecualian) kutipan, dengan memuat di atasnya kata-kata: “Demi Keadilan berdasarkan Ke-Tuhan-an Yang Maha Esa” dan di bawahnya kata-

⁴Martias gelar imam Radjo, Pembahasan Hukum; Penjelasan Istilah Hukum Belanda, Ghalia Jakarta, hlm. 98.

kata “diberikan sebagai grosse pertama” dengan menyebutkan nama dari orang, yang atas permintaannya grosse itu diberikan dan tanggal penerimaannya.⁵

Sedangkan dalam ketentuan Pasal 224 HIR disebutkan yang dimaksud grosse akta ialah akta hipotik dan surat pernyataan berhutang yang dibuat khusus notaris yang diterbitkan di Indonesia dengan kepala “Demi Keadilan berdasarkan Ke-Tuhan-an Yang Maha Esa” yang mempunyai kekuatan eksekutorial sama dengan keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dari semua pendapat dan ketentuan mengenai pengerian grosse akta tersebut di atas maka dapat diketahui bahwa grosse akta mengandung unsur-unsur :

- a. Kepala grosse akta harus memakai di atasnya kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ke-Tuhan-an Yang Maha Esa”.
- b. Isi grosse akta pada prinsipnya memuat seluruh isi minuta akta walaupun dalam perjanjian tertentu grosse akta dapat hanya memuat sebagai isi minuta akta (Pasal 55 ayat 1 UUDN).
- c. Bagian penutup grosse akta memuat kata-kata “diberikan sebagai grosse pertama” serta penyebutan nama orang yang meminta. Penyebutan kata “pertama” pada bagian penutup berkaitan dengan prosedur yang harus ditempuh untuk mengeluarkan grosse akta kedua dan seterusnya (diatur dalam pasal 38 UUDN).

⁵GHS.Lumban Tobing, Peraturan jabatan Notaris, Erlangga Jakarta 1996, hlm. 277.

d. Grosse akta mempunyai kekuatan eksekutorial. Kekuatan eksekutorial inilah yang membedakan grosse akta dengan turunan lainnya.

1.5.1.2. Bentuk Grosse Akta

Dalam Pasal 224 HIR mengenal dan mengandung dua bentuk grosse akta yaitu grosse akta hipotik dan grosse akta pengakuan hutang. Kedua bentuk grosse akta tersebut haruslah masing-masing berdiri sendiri tidak boleh ada dicampur dalam satu obyek hutang sama. Dengan demikian para pihak yang mengadakan perjanjian kredit sudah memilih salah satu bentuk kedua grosse tersebut, maka perjanjian kredit yang bersangkutan tidak boleh lagi ditimpali dengan bentuk perjanjian pengakuan hutang, demikian pula sebaliknya.⁶ Bentuk grosse akta apabila dihubungkan dengan cara pembuatannya dihadapan pejabat tertentu yang berupa akta otentik dapat dibedakan menjadi dua yaitu grosse akta pengakuan hutang yang dibuat di hadapan notaris dan grosse akta Hak Tanggungan yang berupa sertifikat Hak Tanggungan yang dikeluarkan oleh Kepala kantor BPN Kotamadya / Kabupaten Dati II dimana tanah terletak. Keadaan yang ada di Indonesia dewasa ini, akta-akta yang dapat dikeluarkan grossenya adalah akta pengakuan hutang dan sertifikat hak tanggungan yang berdasarkan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang

⁶Djazuli Bachar, Eksekusi putusan perkara Perdata, akademi Presindo jakarta 1987, hlm. 32.

Nomor 4 tahun 1996 adalah sebagai pengganti grosse akta hipotik, untuk tanah dan bangunan-bangunan yang ada diatasnya.

1.5.1.3. Asas Grosse Akta

a. Grosse akta bersifat assesoir.

Grosse akta merupakan ikatan lanjutan yang lahir dari perjanjian pokok. Dalam hal ini perjanjian pokoknya adalah hubungan hukum perjanjian hutang antara debitur dan kreditur. Dari perjanjian hutang piutang ini, bila para pihak menghendaki mereka dapat melekatkan perjanjian dalam bentuk grosse akta, dengan tujuan :

1. Memeberi jaminan yang lebih pasti bagi pihak kreditur tentang pemenuhan pembayaran hutang.
2. Serta sekaligus memberi hak kepada kreditur untuk meminta axecutorial verkoop atas harta kekayaan debitur atau atas barang jaminan sesaat setelah debitur wanprestasi tanpa melalui gugatan perdata biasa.

Antara grosse akta dengan perjanjian pokok saling berkaitan.

b. Grosse akta tidak dapat dibagi-bagi.

Bahwa pembayaran atas sebagian jumlah hutang tidak menggugurkan keabsahan dannilai kekuatan eksekusi (executorial kracht) grosse akta. Asas ini ditegaskan dalam pasal 1163 KUH Perdata, berlaku juga secara analogis terhadap semua bentuk akta. Sekalipun pasal tersebut ditujukan dan diatur dalam pasal-pasal

aturan hipotik. Asas ini berlaku pula secara analogis terhadap grosse akta pengakuan hutang.

- c. Grosse akta mempunyai nilai kekuatan eksekusi seperti putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Apabila semua syarat grosse akta dipenuhi maka dengan sendirinya menurut hukum grosse akta mempunyai kekuatan eksekusi. Nilai kekuatan eksekusi grosse akta sama dengan nilai kekuatan eksekusi yang melekat pada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

- d. Perdamaian satu-satunya yang dapat menunda kekuatan eksekusi grosse akta, asas ini diatur di dalam Pasal 224 HIR bahwa hanya perdamaian yang dapat menangguhkan eksekusi grosse akta.

- e. Eksekusi grosse akta dijalankan atas perintah dan pimpinan Ketua Pengadilan Negeri.

Berdasarkan asas ini executorial verkoop berdasar grosse akta dijalankan atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya orang yang berhutang (debitur bertempat tinggal atau berdiam).⁷

Asas ini diatur di dalam pasal 224 HIR.

1.5.1.4. Kekuatan Pembuktian dari Grosse Akta

Menurut pasal 301 Rbg pada pasal 1888 KUHPdata bahwa kekuatan pembuktian dari surat-surat terletak pada aktanya yang asli.

⁷M.Yahya Harahap, Kedudukan Grosse Akta Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia, Media Notariat Nomor 8-9 tahun 1988, hlm. 109.

Bertitik tolak dari bunyi ketentuan dalam pasal 301 Rbg dan pasal 1888 KUHPerdara ini, kekuatan pembuktian dari akta notaris terletak dalam minuta aktanya, yang menurut pasal 16 UUJN, minut akta notaris itu tetap disimpan oleh notaris dan tidak akan diberikan oleh siapa pun selain dalam hal-hal yang dutetapkan dalam peristiwa umum. Sehubungan dengan masalah ini, dimana kekuatan pembuktian dari suatu akta hanya ada pada aslinya, sedangkan asli dari kata notaris tidak pernah memuat kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, sedangkan minut akta tetap disimpan oleh notaris di dalam protokolnya, maka kepada notaris pemegang minut dari akta diberik wewenang atau bahkan diwajibkan untuk memberi grosse, salinan dan kutipan dari akta-akta yang disimpannya atas permintaan dari pihak yang berkepentingan tentu akan menimbulkan pertanyaan, sejauh manakah kekuatan pembuktian dari grosse dan salinan dari akta-akta yang dibuat atau dikeluarkan oleh notaris penyimpan minut aktanya.

Hal ini adalah penting, sebab sebagaimana telah diketahui bahwa tujuan utama pembuatan akta autentik (akta notaris) adalah untuk dapat dipergunakan sebagai alat pembuktian dari grosse dan salinan dari akta notaris tersebut, telah diatur dalam pasal 302 Rbg, yang menyatakan antara lain : bahwa grosse-grosse dan salinan-salinan pertama mengandung kekuatan bukti yang setaraf dengan aktanya yang asli. Untuk jelasnya pasal 302 Rbg berbunyi

selengkapnya sebagai berikut : Apabila titel yang asli tidak ada lagi maka salinan-salinannya mempunyai kekuatan bukti dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang diuraikan dibawah ini :

1. Grosse-grosse dan salinan-salinan pertama mengandung kekuatan bukti yang setaraf dengan aktanya yang asli, hal yang serupa berlaku juga tentang salinan-salinan yang diperbuat atas perintah hakim di hadapan pihak-pihak yang berperkara atau setelah pihak-pihak itu dengan sempurna telah dipanggil untuk ikut menghadirinya, begitu juga tentang salinan-salinan yang diperbuat di hadapan dan dengan persetujuan masing-masing pihak yang berperkara.
2. Salinan-salinan yang tanpa perantaranya hakim atau di luar persetujuannya pihak-pihak yang bersangkutan dan setelah grosse-grosse dan salinan-salinan pertama dikeluarkan, kemudian diperbuat oleh notaris sesuai dengan minut dari akta yang dilangsungkan dihadapannya atau oleh pejabat-pejabat pemerintah yang dalam jabatan mereka dan selalu menyimpan minut-minut tersebut berhak mengeluarkan salinan-salinannya, dapat diterima oleh hakim sebagai suatu bukti penuh apabila akta yang asli telah hilang.
3. Apabila salinan-salinan uang disalin sesuai dengan minutnya tidak diperbuat oleh notaris di hadapan siapa akta itu telah dilangsungkan atau oleh salah satu penggantinya atau oleh

penjabat-penjabat umum yang dalam kedudukannya itu juga menyimpan akta-akta tersebut, maka salinan-salinan itu hanya dapat diterima sebagai permulaan bukti dengan surat.

4. Salinan-salinan autentik dari salinan-salinan autentik atau dari akta-akta di bawah tangan dapat dalam keadaan-keadaan tertentu mengandung suatu permulaan pembuktian dengan surat.

Dari bunyi ketentuan diatas jelaslah bahwa grosse itu kedadipun sedikit berbeda dengan aslinya sebab pada aslinya maupun minutnya tiada dijumpai kata-kata “Demi keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang terdapat pada grosse itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan akta aslinya. Karena grosse akta itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan akta aslinya, maka grosse akta itu juga merupakan bukti sempurna bagi para pihak dalam akta itu dan para ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapat hak dari padanya, sebagaimana diatur dalam pasal 165 HIR dan pasal 285 Rbg.

Grosse akta memiliki kekuatan pembuktian lahir (uitendige bewijskracht) sesuai dengan asas “acta publica probant seze ipsa”, yang berarti suatu surat yang secara lahiriah tampak sebagai akta autentik, serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan harus dianggap sebagai akta yang sama dengan aslinya, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Dengan kekuatan pembuktian formil (formile bewijskracht) dimaksudkan

bahwa si penandatangan menerangkan apa yang telah ditandatangani benar-benar seperti apa yang dinyatakannya. Dalam hal grosse akta ini, tanda tangan dari notaris yang mengeluarkan grosse akta itu sebagai pejabat penyimpanan dari minut akta dari grosse tersebut, merupakan suatu kepastian bagi setiap orang, bahwa apa-apa yang dituangkan / dimuat dalam grosse akta itu sesuai dengan minutanya yang memuat pernyataan para pihak dalam akta akta tersebut. Dengan demikian grosse akta itu sebagaimana aslinya juga memuat kekuatan pembuktian formal.

Mengenai kekuatan pembuktian materiil (materiele bewijskracht) adalah menyangkut pertanyaan, apakah benar yang dinyatakan / diterangkan dalam akta itu. Jadi menyangkut pembuktian tentang materi, memberi kepastian tentang peristiwa yang diterangkan di dalam akta itu berlaku sebagai yang benar, isinya itu mempunyai kepastian sebagai yang sebenarnya, menjadi terbukti dengan sah di antara para pihak dan di antara para ahli warisnya serta sekalian orang yang memperoleh hak daripadanya tentang apa yang yang dimuat dalam akta itu dan karenagrosse dari akta seperti itu tak lain adalah salinan pertamadengan bentuk yang ditentukan dalam undang-undang secara khusus yang dikeluarkan oleh notaris yang menyimpan minutnya dan menurut pasal 302 Rbg grosse itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan

aslinya, maka grosse itu juga adalah jelas mempunyai kekuatan pembuktian materiil.

1.5.1.5. Macam-macam Grosse Akta

Menurut ketentuan pasal 224 HIR, suatu akta grosse hipotik dan grosse akta yang berisi suatu pengakuan hutang diberikan kekuatan eksekutorial seperti putusan biasa yang telah berkekuatan hukum tetap. Dari ketentuan ini dapat diketahui bahwa grosse akta yang merupakan akta yang dibuat oleh notaris sering juga disebut akta notaris terdiri dari grosse akta hipotik dan grosse akta yang berisi suatu pengakuan hutang.

Suatu grosse akta yang berisi pengakuan hutang hanya dapat dilaksanakan apabila diketahui secara pasti berapa jumlah uang yang harus dilunasi dan bersifat sepihak.⁸ Digunakannya istilah mengakui saja tidaklah berarti bahwa perjanjian pinjam-meminjam kemudian menjadi surat pengakuan hutang. Dengan tertera kata mengakui berarti bahwa legalitas maupun jumlah hutang yang tercantum tidak dapat lagi disangkal atau diingkari. Dengan dicantumkan kata mengakui di atas berarti secara hukum apa yang diuraikan di dalam akta tersebut, hanya boleh emuat perumusan tentang kewajiban pembayaran hutang dengan jumlah yang pasti atau tertentu, sedang grosse akta hipotik adalah merupakan perwujudan nyata dari perjanjian kredit atau pinjam uang yang dilakukan antara pihak

⁸Asikan Kusumah Atmadja, Pengertian Grosse Akta, INI Komisariat Jawa Timur dan Himpunan Mahasiswa Notariat Universitas Airlangga Surabaya, Surabaya, 1986, hlm. 14.

ke kreditur dengan pihak debitur di hadapan atau oleh notaris. Jelasnya bahwa perjanjian kredit merupakan tindakan awal lahirnya hipotik.

Menurut ketentuan pasal 1 dan 15 UUKJ dari semua akta notaris dapat dikeluarkan grosse. Di dalam undang-undang sama sekali tidak dibedakan antara partai acte dan relaas ate. Dalam partai acte debitur mengakui kewajiban-kewajibannya terhadap kreditur, sedangkan dalam relaas acte debitur tunduk kepada relaas yang dibuat oleh notaris atas permintaannya mengenai tindakan-tindakan hukum yang dilakukannya di hadapan notaris.

Grosse akta yang memuat suatu pengakuan hutang, sampai saat ini masih terdapat perbedaan pendapat seperti yang telah dikemukakan di muka. Sekarang tampaknya dalam praktek berkembang suatu paham bahwa jumlah uang tersebut pun tidak harus pasti, artinya pada waktu pengakuan tersebut dibuat saja belum pasti, asalkan pada waktu eksekusi benar-benar dilaksanakan jumlah hutang tersebut dapat dibuktikan.

Dapat dibayangkan kesulitan-kesulitan yang dialami, jika setiap perjanjian pemberian kredit harus mencantumkan secara pasti dan tetap jumlah uang yang akhirnya dibayar oleh debitur, sedangkan sifat khusus dari perjanjian-perjanjian kredit ialah bahwa jumlah yang diijikan untuk dimanfaatkan oleh debitur hanya ditetapkan jumlah maksimalnya, akan tetapi jumlah yang akhirnya dibayar kembali baru dapat ditetapkan setelah perjanjian berakhir.

Diantara tanggal awal perjanjian dan tanggal akhirnya terjadi perubahan-perubahan dalam jumlah tersebut karena dilakukan pengambilan dan penyeteroran kembali oleh debitur.

Seperti halnya terhadap undang-undang, pihak-pihak yang mengadakan perjanjian harus tunduk pada persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan dalam perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh para pihak secara bebas dan atas kehendaknya sendiri untuk berlaku di antara mereka. Hal ini adalah sesuai dengan pasal 1338 KUHPerdara yang menetapkan bahwa pihak-pihak berlaku sebagai undang-undang. Melanggar undang-undang atau mengikari perjanjian yang telah dibuat atas persetujuan bersama mengakibatkan tindakan paksa atau hukuman sesuai dengan undang-undang.

Dengan membuat, menandatangani suatu perjanjian secara tertulis, seseorang dapat dianggap telah menjatuhkan vonis atas dirinya sendiri dan oleh karena itu selanjutnya harus mentaati syarat-syarat perjanjian tersebut seolah-olah hal itu ditetapkan oleh hakim sebagai vonis. Berdasarkan perjanjian tersebut, maka pelaksanaan syarat-syarat perjanjian tersebut seolah-olah hal itu ditetapkan oleh hakim sebagai vonis. Berdasarkan perjanjian tersebut, maka pelaksanaan syarat-syarat perjanjian seperti itu tidak membutuhkan penanggan dari hakim atau pengadilan. Jadi dalam hal suatu perjanjian yang sah, seorang debitur memberi hak kepada kreditur untuk dalam hal kreditur menggunakan haknya untuk menuntut

pembayaran hutang dari debitur berdasarkan akta ini, maka kreditur berhak dan dengan ini diberi kuasa penuh oleh debitur, untuk secara sepihak berdasarkan catatan-catatan dalam buku-buku kreditur, menetapkan jumlah besarkan hutang yang harus dibayar oleh debitur, maka syarat demikian itu harus dianggap cukup dan mengikat bagi dan harus ditaati oleh debitur seolah-olah hal tersebut ditetapkan dengan keputusan hakim.

1.5.2. Tinjauan Umum tentang Grosse Akta Pengakuan Hutang.

1.5.2.1. Pengertian Grosse Akta Pengakuan Hutang.

Definisi grosse akta pengakuan hutang di bawah ini berdasarkan definisi grosse akta dan pendapat dari Mahkamah Agung. Yang dimaksud dengan grosse akta pengakuan hutang adalah :

“Salinan akta otentik yang dikeluarkan oleh notaris atas permintaan pihak yang berkepentingan, yang pada bagian atasnya memuat kata-kata : “DEMI KEADILAN BERDASARKAN YANG MAHA ESA”, dan menggunakan judul “Pengakuan Hutang” sedang pada bagian penutup memuat kata-kata “diberikan sebagai grosse pertama” dengan menyebut nama dari yang memintanya, untuk siapa grosse tersebut dikeluarkan dan tanggal pengeluarannya, yang berisi pertanyaan debitur tentang utang sejumlah uang tertentu kepada kreditur.”⁹

⁹Soetomo Soedja, Grosse Akta Pengakuan hutang dan Grosse Akta Hipotik, media Notariat Nomor 8-9 tahun 1998, hlm. 166.

1.5.2.2. Syarat Grosse Akta Pengakuan Hutang.

Supaya nilai kekuatan eksekusi (*executorial kracht*) langsung melekat pada *grosse akta*, harus dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang dan peraturan. Mengenai syarat sahnya *grosse akta* dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu syarat formil dan syarat materiil. Syarat formil *grosse akta pengakuan hutang* terdiri dari :

- a. *Grosse akta pengakuan hutang* pada bagian kepala harus memuat irah-irah : “Demi Keadilan Berdasarkan Ke-Tuhan-an Yang Maha Esa”.
- b. Menggunakan judul “*Pengakuan Hutang*” dan pada bagian bawahnya dicantumkan kata-kata “diberikan sebagai *grosse pertama*”.
- c. Dicantumkan pula nama orang yang mana atas permintaannya *grosse akta pengakuan hutang* tersebut diberikan.
- d. Dicantumkan pula tanggal pemberian *grosse akta pengakuan hutang*.

Sedangkan syarat materiil dari *grosse akta pengakuan hutang* adalah bahwa *grosse akta pengakuan hutang* hanya berisi pertanyaan berhutang jumlah tertentu oleh debitur kepada kreditur atau kewajiban pembayaran kembali jumlah hutang tertentu secara pasti. Di dalam suatu *grosse akta pengakuan hutang* tidak diperbolehkan memuat persyaratan lain yang berbentuk perjanjian.

Syarat Bentuk dan Syarat Isi :

1. Kepala Grosse Akta Pengakuan Hutang.

Pada bagian kepala memuat kata-kata : “Demi Keadilan Berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa” (Pasal 224 HIR jo Pasal 38 ayat 2 UUJN). Apabila pada bagian kepala grosse akta pengakuan hutang tidak memuat kata-kata tersebut maka grosse akta pengakuan hutang tidak mempunyai kekuatan eksekutorial. Bila notaris lupa atau lalai mencantumkan kata-kata tersebut dalam kepala grosse akta pengakuan hutang maka notaris akan dikenai sanksi denda.

2. Nomor Grosse Akta Pengakuan Hutang.

Nomor grosse akta pengakuan hutang sama dengan akta otentiknya. Walaupun tidak ada ketentuan dalam UUJN yang menerapkan sanksi bagi notaris yang mencantumkan nomor pada setiap aktanya, namun dengan pemberian nomor akta tentunya dapat membantu administrasi dan menguntungkan bagi notaris sendiri untuk membantu arsipnya.

3. Judul Akta.

Dalam Peraturan Jabatan Notaris tidak ada ketentuan notaris harus mencantumkan judul. Walaupun demikian apabila suatu akta dibuat tanpa judul tentunya akan membingungkan notaris dan para pihak yang memuat akta tersebut. Untuk akta pengakuan hutang ini, mencantumkan judul “Pengakuan Hutang” tentunya

mampu memperlancar eksekusi, daripada dengan menggunakan judul lain seperti “kesanggupan untuk membayar”.

4. Awal Akta Grosse Akta Pengakuan Hutang.

Pada awal akta grosse akta pengakuan hutang harus dimuat hari dan tanggal dibuatnya akta, nama lengkap para pihak dan tempat kedudukan notaris serta sanksi-sanksi instrumentair. Pelanggaran terhadap ketentuan ini maka notaris dapat dikenai sanksi berupa denda atau akta notaris hanya sebagai akta dibawah tangan.

5. Komparisi.

Komparisi adalah kewenangan menghadap dari masing-masing pihak di depan Penjabat yang berwenang untuk bertindak hukum untuk mana akta tersebut dibuat. Isi komparisi tergantung dari jenis akta yang dibuat oleh notaris. Jika yang dibuat oleh notaris adalah akta pihak maka komparisi berisi keterangan notaris mengenai para menghadap, sedangkan apabila yang dibuat akta penjabat, komparisinya berisi keterangan notaris mengenai siapa yang minta dibuatkan akta. Mengenai jenis aktanya, grosse akta pengakuan hutang adalah akta pihak. Komparisi grosse akta pengakuan hutang notariil adalah keterangan notaris mengenai menghadap yang menghendaki dibuatnya grosse akta pengakuan hutang dengan dicantumkan nama menghadap, jabatannya, tempat tanggal lahir dan keterangan tentang kewenangan bertindak (Pasal 39 ayat (2) UUJN).

6. Premis.

Dalam Peraturan Jabatan Notaris tidak ada ketentuan yang mengharuskan pemuatan premis dalam akta otentik. Pada bagian premis grosse akta pengakuan hutang dapat disebutkan perjanjian yang menjadi dasar dilakukannya hutang. Bila dasar pengakuan hutang terdapat bunga atau denda maka perhitungan jumlah seluruh hutang dicantumkan pada bagian premis akta.

7. Isi Grosse Akta Pengakuan Hutang.

- a . Pengakuan hutang sepihak oleh debitur.
- b . Kewajiban membayar sejumlah uang tertentu.
- c . Dalam jangka waktu tertentu.
- d . Tempat pembayaran.
- e . Opeisbaarheid (dapat ditagih).

1.5.2.3. Eksekusi Grosse Akta Pengakuan Hutang

Istilah eksekusi dalam literatur Hukum Acara Perdata adalah “pelaksanaan putusan”. Eksekusi sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara merupakan aturan dan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara. Eksekusi ini dapat pula dapat diartikan “menjalankan putusan” pengadilan, yang melaksanakan secara paksa putusan pengadilan dengan bantuan kekuatan umum apabila pihak yang kalah tidak mau menjalankannya secara sukarela, eksekusi dapat dilaksanakan apabila telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Selain putusan hakim (vonnis), tulisan-tulisan yang memenuhi syarat-syarat tertentu seperti dalam Pasal 224 HIR juga dapat dieksekusi yaitu :

1. Grosse surat hutang notariil (grosse akta pengakuan hutang), yang dilakukan tanpa jaminan hipotik.
2. Benda jaminan hipotik dan grosse akta hipotik (sertifikat) yang dilakukan terhadap jaminan hipotik.

Yang dimaksud dengan mempunyai “kekuatan seperti putusan hakim” dalam Pasal 224 HIR adalah kekuatan eksekutorial. Hal tersebut terlihat dari kalimat kedua yang menyatakan “hak menjalankannya jika tidak dilaksanakan secara sukarela, maka pelaksanaanya dijalankan atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri”. Dan letak pasal 224 HIR itu sendiri di dalam BAB IX bagian Kelima tentang pelaksanaan putusan hakim. Pada pelaksanaan grosse akta pengakuan hutang, debitur harus sudah wanprestasi dan harus ada fiat eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri. Pengajuan eksekusi grosse akta pengakuan hutang dalam praktek dilaksanakan baik secara lisan maupun tertulis. Permohonan eksekusi tersebut ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri kemudian pihak yang bersangkutan membayar biaya eksekusi yang ditentukan oleh panitera Pengadilan Negeri. Sebelum eksekusi itu

dijalankan ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh Pengadilan Negeri yaitu:¹⁰

a) Aanmaning (teguran) sebagaimana diatur dalam pasal 196 HIR.

“Jika pihak yang kalah enggan atau lalai untuk sukarela melaksanakan isi putusan, maka pihak yang dimenangkan mengajukan permohonan baik dengan lisan atau tertulis kepada ketua Pengadilan negeri yang memutus perkara putusannya dilaksanakan. Ketua Pengadilan Negeri memanggil pihak yang kalah supaya menghadap dan ia memperingatkan supaya dalam jangka waktu yang ditentukan paling lama delapan hari pelaksanaan putusan itu”.

Dari ketentuan Pasal 196 HIR tersebut maka dapat diketahui bahwa pengadilan sebelum menjalankan eksekusi harus terlebih dahulu melakukan teguran. Dalam prakteknya teguran dilakukan sampai dua atau tiga kali.

b) Sita Eksekusi

Jika telah lewat delapan hari setelah peneguran tersebut dan pihak yang dikalahkan belum juga mau menjalankan atau memenuhi isi putusan, atau jika orang yang dikalahkan tersebut telah dipanggil untuk ditegur dengan patut tidak juga menghadap Ketua Pengadilan Negeri, maka Ketua pengadilan negeri karena jabatannya memberi perintah kepada panitera pengganti tau juru sita pengganti dengan suatu surat penetapan supaya menyita barang-barang orang yang dikalahkan (debitur) atau barang-barang yang menjadi obyek sengketa guna kepentingan menjalankan putusan lebih lanjut, penyitaan ini disebut sita

¹⁰ Victor Situmorang dan Cormentya Sitanggang, Op.Cit, hlm. 122.

eksekusi. Sita eksekutorial tidak lagi diperlukan apabila sebelum perkara tersebut diputuskan oleh hakim, pihak kreditur telah meletakkan sita pendahuluan terhadap barang-barang jaminan. Hal ini karena dalam sita pendahuluan putusannya telah dinyatakan sah dan berharga. Setelah dilakukan penyitaan kemudian dibuatkan berita acara penyitaan yang ditandatangani oleh panitera pengganti atau juru sita pengganti dan dua orang saksi. Selanjutnya berita acara tersebut diberitahukan kepada kepala desa atau lurah dengan maksud agar barang tersebut tidak dipindahtangankan oleh orang yang dikenai eksekusi (Pasal 198 HIR). Ketua Pengadilan Negeri melalui surat penetapan eksekusi memerintahkan kepada panitera atau juru sita menjalankan eksekusi dan yang bersangkutan memberitahukan kepada pejabat setempat dimana eksekusi akan dilaksanakan. Pelaksanaan putusan hakim atau eksekusi dalam perkara perdata dilaksanakan oleh panitera pengganti atau juru sita pengganti yang dipimpin oleh ketua pengadilan negeri dengan memperhatikan perikemanusiaan, hal ini diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 serta Pasal 195 ayat 1 jo Pasal 197 ayat (2) HIR.¹¹

¹¹ Victor Situmorang & Cormentya, op.cit, hlm. 122.

1.5.3. Pelaksanaan Eksekusi Grosse Akta Pengakuan Hutang

Pelaksanaan eksekusi grosse akta sebagai berikut :

- a. Jika mengacu pada sistem hukum, atau mengacu kepada peraturan perundangan atau mengacu kepada maksud semula iadakannya lembaga Grosse Akta Notaris, tentu saja harus dikembalikan kepada niat, maksud dan tujuan dengan dijiwai oleh azas manfaat.
- b. Niat, maksud dan tujuan diadakannya lembaga Grosse Akta Notaris, sungguh sangat simpel, yaitu untuk memudahkan dan menyederhanakan proses penyelesaian sengketa atau perselisihan diantara pihak-pihak yang tertuang dalam suatu akta notaris; Untuk keperluan dan guna mencapai maksud tersebut, “tuntutan” masyarakat para pencari keadilan, tiada lain adalah melaksanakan eksekusi sebagai realisasi atau mewujudkan apa yang telah disepakati oleh pihak-pihak sebagaimana itu tertuang/tertulis didalam GROSSE (yang merupakan salinan/turunan) dari akta perjanjian yang mengikat dan bersifat “memaksa bagi pihak-pihak pada akta tersebut.

Oleh karenanya, tidak akan pernah ada alasan atau dasar hukum apapun dan bagi siapapun untuk menghalangi atau menolak pelaksanaan eksekusi GROSSE dari akta notaris dimaksud:

Jika sampai ada (upaya /usaha) penolakan untuk pelaksanaan eksekusi atas GROSSE akta notaris – menurut kenyataan memang itu ada justru harus dipertanyakan dan diminta

pertanggung jawabannya kepada orang/pejabat atau pengusaha yang bersangkutan.

Secara singkat, proses pelaksanaan atau realisasi eksekusi berdasarkan GROSSE dari akta notaris itu, adalah sebagai berikut:

1. Perbuatan hukum berupa kesepakatan dan kemufakatan diantara pihak-pihak yang berkepentingan itu, mereka harus menuangkannya dalam sebuah akta notaris, yang memuat isi perjanjian, hak-hak dan kewajiban, tuntutan dan prestasi dari masing-masing pihak, yang karenanya menurut hukum, perjanjian dan kesepakatan diantara pihak-pihak yang termuat didalam akta itu kekuatannya sama dengan undang-undang sehingga bersifat memaksa dan mengikat pihak-pihak untuk melaksanakannya.
2. Masing-masing pihak pada akta, yang mempunyai hak tagih, yang mempunyai hak untuk menuntut prestasi dari “pihak lawan” (tegen pertij) didalam akta yang bersangkutan, diperbolehkan atau berhak untuk meminta dan memperoleh GROSSE dari akta tersebut, yang tidak lain itu adalah salinan/turunan yang sama bunyinya/isinya dengan minuta akta dimaksud. Karena itu, notaris yang memuat akta yang bersangkutan, berkewajiban dan secara hukum terikat untuk memberikan salinan dan/atau GROSSE dari akta itu, kepada pihak yang berkepentingan langsung, atau para penerima hak dari padanya atau para ahli warisnya.

3. Pihak pemegang GROSSE dari akta notaris yang bertitel eksekutorial tersebut dengan memakai judul “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, dapat, boleh dan berhak untuk meminta “fiat eksekusi” kepada/melalui Ketua Pengadilan Negeri (menurut sistem hukum, tidak diperlukan fiat eksekusi).
4. Ketua Pengadilan, terikat dan berkewajiban untuk memenuhi permintaan pihak yang berkepentingan, dengan dasar GROSSE akta notaris itu, sehingga eksekusi tersebut dapat terlaksana secara efektif; kesemuannya itu telah dijamin oleh hukum dan perundang-undangan yang berlaku, sekaligus diterima dan diakui oleh serta sesuai pula dengan kesadaran hukum masyarakat, atau dengan kata lain, tidak akan ada alasan yang berdasar, bagi siapapun juga untuk menunda-nunda dan menghalang-halangi apalagi untuk menolak pelaksanaan eksekusi berdasarkan GROSSE dari akta notaris, kecuali “hasad” asal dasar pangkal penyebabnya.
5. Juru sita dan demikian juga juru lelang atau pejabat siapapun, yang diberi wewenang serta kekuasaan untuk melaksanakannya, terikat dan berkewajiban untuk menjalankan tugas, kewajiban serta bertanggung jawab penuh dengan segala konsekwensi dan resikonya.

6. Ketua Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi yudikatif, berdasarkan peraturan perundang-undangan, paling tidak diatur dalam 7 peraturan perundangundangan yang hingga saat ini masih tetap berlaku, kewajiban dan ketanggung-jawab untuk melakukan pengawasan terhadap para ketua Pengadilan, para hakim Pengadilan dan pelaksanaan eksekusi itu sendiri. Pengambilan dan penerimaan dari hasil eksekusi itu sendiri, tidak boleh melebihi dari porsi dan hak bagian pihak-pihak yang berkepentingan sebagaimana telah ditentukan didalam GROSSE dari akta notaris yang bersangkutan.¹²

c. Manfaat yang sangat besar yang akan dirasakan oleh masyarakat adalah, diantaranya:

1. Efficient dan sangat effectif.
2. Penyelesaian engketa dan perselisihan dalam hubungan hukum perdata, dijamin pasti mudah, sederhana, cepat, hampir tanpa ada biaya.
3. Tidak menimbulkan permusuhan atau rasa dendam bagi semua pihak rasa persaudaraan dan hubungan silaturahmi diantara pihak-pihak tetap terpelihara dengan baik, dan tidak banyak melibatkan pihak lain siapapun;
4. Terhindar dari publikasi negatif, yang bagi para pengusaha, merupakan hal yang sangat tabu dan selalu dijaui;

¹² M.Yahya Harahap, SH, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Sinar Grafika, Jakarta 2006, hlm. 131-132

5. Perkara perdata di pengadilan-pengadilan, akan jauh berkurang demikian pula tunggakan perkara akan cepat habis terkikis, beban pekerjaan hakim pengadilan pasti berkurang bahkan upaya banding dan kasasi dengan sendirinya, mendekati angka nihil;
6. Menghilangkan akses, termasuk akan menutup peluang terjadinya kecurangan, penyimpangan, pelanggaran, kejahatan, korupsi, kolusi, suap dan perbuatan-perbuatan negatif lainnya yang jika secara konvensional penanganannya pasti sulit untuk diberantas;
7. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan pemerintah dan negara bahkan dapat meningkatkan citra-wibawa bangsa dan negara di dunia Internasional, khususnya dalam penegakan hukum dan yang pasti adalah: adanya jaminan kepastian hukum yang bermuara pada tercapainya rasa keadilan melalui proses yang sungguh manusiawi secara alamiah;
8. Mendidik masyarakat, untuk berlaku jujur, senantiasa memenuhi kewajiban-kewajibannya serta senantiasa menghormati hak orang lain artinya mereka yang sudah berjanji sebagaimana dia akui secara tegas didalam akta notaris itu tidak begitu saja dengan menggampangkan untuk mengingkari dan ingkar janji, disinilah peranan suatu sistem

sebagai sarana, sebagai media untuk mewujudkan pendidikan moral, pendidikan ahlak dan sekaligus itulah pendidikan agama;¹³

1.5.4. Kompetensi Pengadilan

Permohonan eksekusi grosse akta harus disampaikan kepada Ketua Pengadilan negeri di dalam wilayah mana debitor tinggal atau kedudukan hukum yang dipilihnya (pasal 224 HIR). Apabila kekayaan debitor yang harus dieksekusi berada dalam wilayah Pengadilan Negeri lain, maka pengadilan negeri yang menerima permohonan eksekusi minta bantuan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi dimana benda yang akan dieksekusi terletak. Selanjutnya ketua Pengadilan Negeri yang diminta bantuannya inilah yang menjalankan eksekusi. Segala tindakan yang dilakukan dalam menjalankan eksekusi dan penyelesaiannya diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang meminta bantuan (pasal 195 ayat (2) dan ayat (6) HIR).

¹³ M.Yahya Harahap, SH, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Sinar Grafika, Jakarta 2006, hlm. 133

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Pendekatan Masalah

1.6.1.1. Jenis dan Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu suatu penelitian hukum yang menekankan pada teori-teori hukum dan aturan-aturan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, khususnya yang berkaitan dengan peranan grosse akta pengakuan hutang dalam eksekusi jaminan kredit.

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum deskriptif analitis. Dalam arti penelitian ini diharapkan mampu melukiskan gambaran secara sistematis, terperinci dan menyeluruh tentang “Peranan Grosse Akta Pengakuan Hutang Dalam Eksekusi Jaminan Kredit Harta Kekayaan”. Dalam hal ini pembahasan analisis mengenai analisis mengenai ruang lingkup grosse akta dimaksudkan untuk dapat memperoleh pembahasan tentang pokok permasalahan yang ada di Pengadilan Negeri Surabaya.

1.6.1.2. Sumber Data

Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen. Sedangkan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan

dengan cara menelusuri literatur yang berhubungan dengan penelitian. Data sekunder terbagi lagi menjadi :

A. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang sifatnya mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas, seperti :

- a) KUHPerdota.
- b) Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004.
- c) HIR / RBG

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer, dimana bahan hukum sekunder berupa buku literatur, seperti :

- a) Buku-buku tentang Hukum Perdata.
- b) Buku-buku mengenai tentang Grosse Akta Pengakuan Hutang.
- c) Buku-buku mengenai tentang Panduan Teori Notaris.
- d) Buku-buku tentang Penelitian Hukum.
- e) Handout-handout mata kuliah Metode Penelian Hukum

C. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier, adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti :

- a) Kamus Hukum.
- b) Kamus Bahasa Indonesia.
- c) Kamus Bahasa Inggris-Indonesia

1.6.2. Metode Pengumpulan dan Pengelolaan Data

Sesuai dengan sumber data seperti yang dijelaskan di atas, maka dalam penelitian ini pengumpulan data yang digunakan adalah data sekunder (secondary data) dan data primer (primary data). Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari peneliti kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang biasanya disediakan dipergustakaan, atau milik pribadi. Sedangkan yang dimaksud dengan data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat.

Metode dan alat pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah :

1. Studi Kepustakaan

Terhadap data sekunder dikumpulkan dengan melakukan studi kepustakaan, yaitu dengan mencari dan mengumpulkan literatur yang berhubungan dengan grosse akta pengakuan hutang yang sesuai dengan Undang-Undang yang berhubungan dengan grosse akta.

2. Wawancara

Terhadap data lapangan (primer) yang dikumpulkan dengan teknik wawancara tidak terarah (non-directive interview) atau tidak terstruktur (free flowing interview) yaitu dengan mengadakan komunikasi langsung kepada informan, dengan menggunakan pedoman wawancara (interview guide) guna mencari informasi yang akurat dari informan terkait secara langsung.

3. Observasi

Peneliti menggunakan pengamatan langsung terhadap semua kegiatan dan tahap-tahap selama proses penyelesaian grosse akata pengakuan hutang di Pengadilan Negeri Surabaya. Metode observasi digunakan untuk mendapatkan data yang akurat.

1.6.3. Metode Analisis Data

Pengolahan data menggunakan metode diskriptif analisis artinya data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.

1.6.4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau daerah yang dipilih sebagai tempat pengumpulan data di lapangan untuk menemukan jawaban atas masalah. Lokasi yang dipilih sebagai peneliti adalah Pengadilan Negeri Surabaya.

1.6.5. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini adalah 4 (empat) bulan, dimulai dari bulan Juli 2011 sampai dengan Oktober 2011. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli minggu pertama. Tahap persiapan penelitian ini meliputi : penentuan judul penelitian, penulisan proposal, seminar proposal, dan perbaikan proposal. Tahap pelaksanaan penelitian selama empat bulan terhitung mulai minggu pertama bulan Juli sampai bulan Oktober minggu terakhir, meliputi pengumpulan sumber data primer dan sumber data sekunder.

1.6.6. Sistematika Penulisan

1.6.6.1. Bagian awal skripsi terdiri dari : Halaman Judul, Halaman Pengesahan, Kata Pengantar, Daftar Isi, Daftar Tabel, Daftar Bagan, Daftar Lampiran.

1.6.6.2. Bagian isi skripsi terdiri dari :

Bab Pertama, berisi tentang Pendahuluan. Pada bab ini memberikan gambaran umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi, meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini serta pertanggung jawaban sistematika. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberiikan pengertian kepada

pembaca agar dapat mengetahui secara garis besar pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini.

Bab Kedua, berisi tentang Peranan Grosse Akta Pengakuan Hutang Dalam Penyelesaian Eksekusi Jaminan Kredit. Di dalam bab ini menguraikan tentang Peranan Grosse Akta Pengakuan Hutang Dalam Penyelesaian Eksekusi Jaminan Kredit. Pada bab ini terdiri dari dua sub bab yaitu Pertama, Keuntungan penyelesaian eksekusi jaminan kredit harta kekayaan debitur dengan grosse akta pengakuan hutang. Kedua, Tata cara pelaksanaan eksekusi jaminan kredit harta kekayaan debitur dengan menggunakan grosse akta pengakuan hutang.

Bab Ketiga, berisi tentang Hambatan Pelaksanaan Eksekusi Grosse Akta Pengakuan Hutang Di Pengadilan. Di dalam bab ini menguraikan tentang Hambatan Pelaksanaan Eksekusi Grosse Akta Pengakuan Hutang Di Pengadilan. Pada bab ini terdiri dari dua sub bab yaitu Pertama, Adanya perbedaan pendapat antar notaris dan hakim mengenai akta-akta yang dapat dibuat dalam bentuk grosse yang berkekuatan eksekutorial. Kedua, Penyalahgunaan isi grosse akta.

Bab Keempat, berisi tentang Penutup. Dalam bab ini akan membahas tentang kesimpulan dan saran terhadap pokok permasalahan. Pada bab terakhir dari penulisan skripsi ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dari bab-bab yang sebelumnya, dan kemudian dikemukakan beberapa saran yang relevan dengan permasalahan yang ada, yang sekiranya dapat memberikan manfaat terhadap permasalahan tersebut.